

**PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh
MUBA ARFIANI
105710221315



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh
MUBA ARFIANI
105710221315

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda. Ketulusan yang dari hati atas doa yang tidak pernah putus, juga semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekat yang tersayang, dan untuk Almamater Kebanggaan.



Sabar sesaat saja disaat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan.
- Ali Bin Abi Thalib



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972
Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : "Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten
Gowa

Nama Mahasiswa : Muba Arfan
NIM : 105710220715
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 30 September 2019 di Ruang
IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,


Hi. Naidah, SE, M.Si
NIDN : 0010026403

Pembimbing II,


Abdul Muttalib, SE, MM
NIDN : 0901125901

Mengetahui,

Ketua Program Studi EP,


Hi. Naidah, SE, M.Si
NIM : 740551



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972
Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Muba Arfiani**, NIM **105710220715**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0007/SK-Y/60201/091004/2019, Tanggal 1 Safar 1441 H / 30 September 2019, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Safar 1440 H
30 September 2019

PANITIA UJIAN

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pengawas Umum : | Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua : | Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris : | Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji : | 1. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si
2. Asriati, SE., M.Si
3. Dr. Buyung Romadhoni, SE., M.Si
4. Asdar, SE., M.Si |

(Handwritten signatures of the exam committee members)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ismail Rasulong, SE., MM
NIM 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972
Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muba Arfiani
Nim : 105710220715
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dengan Judul : Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah
Ternadap Indeks Pembangunan Manusia di
Kabupaten Gowa.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,


Muba Arfiani

Diketahui Oleh:


H. Naidah, SE., MM
NBM: 903078


Ketua Program Studi
H. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 551

ABSTRAK

Muba Arfiani, Tahun 2019 **Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia** Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hj. Naidah dan Abdul Mutthalib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah sektor ekonomi pada barang jasa. Jenis penelitian ini ialah kuantitatif, dengan teknik analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian secara parsial variabel (1) belanja pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikan $0,182 > 0,05$. (2) Belanja pemerintah bsektor kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikan $0,007 > 0,05$. (3) Belanja pemerintah sektor ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikan $0,075 > 0,05$.

Kata kunci : Belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan, belanja pemerintah sektor ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



ABSTRACT

Muba Arfiani, Tahun 2019 **Effect Of The Local Government Spending On The Human Development Index In Gowa District**, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Development Economy Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Hj. Naidah and Abdul Mutthalib.

This research aims to determine the influence of government expenditure on education sector, government expenditure of the health sector and the Government's expenditure on economic sectors. This type of research is quantitative, with a technique of multiple linear regression analysis. The results of a partial variable (1) government expenditure in the education sector did not affect the human development index with a significant value of $0.182 > 0.05$. (2) The government expenditure of health sector significantly affects the human development index with a significant value $0.007 > 0.05$. (3) The Government's expenditure on economic sectors has no significant effect on the human development index with a significant value $0.075 > 0.05$.

Keywords : Government Expenditure Education Sector, Government Spending Health Sector, Government Expenditure On Economic Sector, Human Development Index



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Amir dan Ibunda Hj. Hafsah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan member semangat gingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak semoga amal kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhana Wa Ta'ala dengana balasan yang lebih baik. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .

2. Bapak Ismail Rasulong, S.E.,M.M. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj.Naidah,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Abdul Mutthalib, SE., MM selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Sahabatku Nurhalisa Nurmi Karisma yang selalu mau mendengarkan segala keluh kesah, menghibur dan memperindah masa kuliah penulis.
8. Rekan seperjuangan kelas IESP 3 khususnya Indo Aco dan Resky Dewiyanti yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Gowa, 24 September 2019



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Mamfaat Penalitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pembangunan Manusia.....	10
B. Belanja Pemerintah	15
C. Penelitian Terdahulu.....	18

D. Kerangka Konsep	21
E. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	24
D. Populasi dan sampel	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Penelitian	32
B. Deskriptif Variabel Penelitian	34
C. Hasil Penelitian	39
D. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2018	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1	Luas Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2018	34
Tabel 4.2	Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018	35
Tabel 4.3	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)	36
Tabel 4.4	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Sektor Kesehatan Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)	37
Tabel 4.5	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Sektor Ekonomi Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)	39
Tabel 4.6	Uji Multikolinearisasi	41
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi <i>Runt Test</i>	42
Tabel 4.8	Uji T	44

Tabel 4.9	Uji F	46
Tabel 4.10	Uji Determinasi R^2	47
Tabel 4.11	Uji Regresi Linear Berganda	48



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	22
Gambar 4.1	Uji Normalitas Probability Plot	40
Gambar 4.2	Uji Heterokedastisitas	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian.....	58
2. Hasil Uji SPSS 21.....	59
3. Surat Penelitian.....	62
4. Dokumentasi Penelitian.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia (*Human Development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (Todaro, 2011: 87).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2011:102). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu; angka harapan hidup pada waktu lahir (*Life Expectancy At Birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*Adult Literacy Rate*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*), dan kemampuan daya

beli (*Purchasing Power Parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (BPS, 2018).

Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan maka akan semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik (BPS, 2018).

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri salah satunya adalah kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap

tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (BPS, 2018).

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pada masa pemerintahan orde baru, kepengurusan menyangkut pemerintahan dan keuangan masih terpusat. Sejak otonomi daerah itulah desentralisasi kepengurusan daerah terjadi.

Desentralisasi adalah bagaimana setiap daerah mampu mengelola anggaran pembangunan serta seluruh aspek ekonomi secara mandiri. Desentralisasi akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-

masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Awari, 2015: 8).

Sektor pendukung dimensi IPM yang terkandung dalam anggaran belanja pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentunya juga memegang peranan. Kebutuhan yang berbeda pada tiap daerah kabupaten/kota juga membuat perbedaan pengalokasian anggaran dan tentunya juga berimbas pada pencapaian IPM. Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011: 5).

Provinsi Sulawesi Selatan disorot sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor penunjang pembangunan manusia seperti sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga turut mengalami peningkatan anggaran. Data publikasi BPS memperlihatkan bahwa IPM Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-
2018

Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kepulauan Selayar	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04
Bulukumba	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70
Bantaeng	65,24	65,58	66,46	67,08	67,76
Jeneponto	61,45	61,61	61,81	62,67	63,33
Takalar	63,53	64,07	64,96	65,48	66,07
Gowa	66,12	66,87	67,70	68,33	68,87
Sinjai	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24
Maros	66,65	67,13	67,76	68,42	68,94
Pangkajene Kepulauan	66,16	66,65	66,86	67,25	67,71
Barru	67,94	68,64	69,07	69,56	70,05
Bone	62,09	63,11	63,86	64,16	65,04
Soppeng	64,74	65,33	65,95	66,67	67,60
Wajo	66,49	66,90	67,52	68,18	68,57
Sidrap	68,14	69,00	69,39	69,84	70,60
Pinrang	68,92	69,24	69,42	69,90	70,62
Enrekang	69,37	70,03	70,79	71,44	72,15
Luwu	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60
Tana Toraja	65,08	65,75	66,25	66,82	67,66
Luwu Utara	66,90	67,44	67,81	68,38	68,79
Luwu Timur	69,75	70,43	70,95	71,46	72,16
Toraja Utara	66,15	66,76	67,49	67,90	68,49
Kota Makassar	79,35	79,94	80,53	81,13	81,73
Kota Pare-pare	75,66	76,31	76,48	76,68	77,19
Kota Palopo	75,65	76,27	76,45	76,71	77,30
Sulawesi Selatan	68,49	69,15	67,76	70,34	70,90

Sumber: Bps Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa dalam Angka 2018

Pada tabel 1.1 tahun 2013 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 68,49 persen dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2014 mencapai angka 70,90 persen. Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurun waktu 2014-2018 ini menggambarkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan namun angkanya masih relatif lebih rendah dibandingkan angka IPM Nasional. Menurut BPS (2018) UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: Low (IPM kurang dari 50), Lower Medium (IPM antara 50 dan 65,99), Upper-Medium (IPM antara 66 dan 79,99) dan High (IPM 80 ke atas). Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2007-2016 masih termasuk kategori menengah-atas/ Upper-Medium (IPM antara 66 dan 79,99). Pada tabel 1.1 kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan. Angka IPM tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu 68,87, nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa selama periode tahun 2014-2018 masih termasuk kategori menengah-atas/ *Upper-Medium* (IPM antara 66 dan 79,99).

Peningkatan IPM yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daerah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan manusia di daerah. Hal ini berkaitan lagi dengan dana alokasi yang dicanangkan untuk membangun fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai katalisator pembangunan manusia daerah, terutama pada sektor-sektor yang vital seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap daerah memiliki pendapatan dan kemampuan alokasi yang berbeda, oleh karena itu tingkat IPM yang dicapai setiap daerah juga berbeda-beda.

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Realisasi dana dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf dan lamanya pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat (Daegal, 2015).

Semakin besar realisasi belanja daerah untuk kedua faktor tersebut diharapkan akan meningkatkan pembangunan manusia daerah yang diukur dengan IPM, akan tetapi pada kenyataannya pada daerah di Indonesia terdapat wilayah-wilayah dimana tingkat alokasi belanja untuk kedua faktor tersebut cukup besar namun tidak mendongkrak secara signifikan tingkat IPM pada wilayah-wilayah tersebut. Selain itu juga masih terdapat disparitas pembangunan manusia yang ada di wilayah-wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa?
2. Apakah Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa?

3. Apakah Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi pada barang dan jasa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi pada barang dan jasa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi IPM.
 - b. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menyangkut belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nations Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut (Sukirno, 2015: 76).

Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia diantara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa dimensi dasar ini, maka dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat dicapai. Pembangunan manusia merupakan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan. Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pertama, fungsi dari keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi. Sebagaimana laporan UNDP

yang ditulis oleh Sukirno, bahwa dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian dan merupakan akhir dari sasaran pembangunan.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan di suatu negara dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya (Sukirno, 2015: 81).

Menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat diukur

seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan pemerataan antar generasi dalam masyarakat (Subandi, 2014: 68).

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme*, alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan (Subandi, 2014: 70). Adapun komponen-komponen IPM menurut UNDP sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tidak langsung (*Indirect Estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup

(ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara di dunia).

Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

b. Tingkat pendidikan

Mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*Mean Years Schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Ratarata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

c. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi sedangkan BPS dalam memperhitungkan standar hidup layak menggunakan rata-rata belanja per kapita riil.

2. Metode Perhitungan IPM dan Komponennya

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), Penyusunan untuk setiap komponen IPM dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

X_i = Indikator komponen IPM ke-i (i = 1,2,3)

X_{\max} = Nilai maksimum X_i

X_{\min} = Nilai minimum X_i

- b. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3(X_1 + X_2 + X_3) \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

Keterangan:

X_1 = Indeks angka harapan hidup

X_2 = $2/3$ (Indeks melek huruf) + $1/3$ (Indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = Indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

B. Belanja Pemerintah

1. Teori Belanja Pemerintah

a. Teori Rostow dan Musgrave

Model ini diperkenalkan dan di kembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, Investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar (Subandi, 2014: 80).

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa belanja pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif belanja pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat

dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya belanja pemerintah yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan (Sukirno, 2015: 89).

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan belanja pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar belanjanya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai belanja pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan belanja pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan belanja pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak.

2. Konsep Belanja Pemerintah

Sebagian dari belanja pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatankegiatan pembangunan dan beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Dalam APBN belanja pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah belanja yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

b. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan adalah belanja yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Menurut Sukirno (2015), pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

- 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal.
- 2) Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian apabila berada dalam keadaan disequilibrium.
- 4) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

C. Penelitian Terdahulu

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Kajian tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan pembangunan manusia yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut uraian tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Imran, Firtiadi dan Muliati (2017)	pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangu n manusia	jenis penelian deskriptif kuantitatif model regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil analisis regresi, bahwa variabel pengeluaran sektor pendidikan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,08 persen, yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai sebesar 0,037, nilainya lebih kecil dari α atau $0,037 < 0,050$. Berdasarkan hasil analisis regresi, bahwa variabel pengeluaran sektor kesehatan memiliki nilai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan sebesar -

				0,009 persen, yang artinya adalah bahwa pengeluaran sektor kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,786 persen yang menunjukkan nilainya lebih kecil dari α atau $0,342 > 0,050$.
2.	Hadi Sasana (2012)	Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah).	Analisis data dilakukan dengan menggunakan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> dengan program perangkat lunak <i>Eviews</i> . Populasi penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dan kabupaten / kota tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2006 sampai 2008.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3.	Mahirsyah Pradana (2016)	Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda. Variabel tergantung penelitian ini ialah IPM. Variabel bebas penelitian ini ialah alokasi belanja operasi,	Alokasi belanja operasi berefek positif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi belanja modal berefek negatif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi belanja tak terduga berefek negatif dan

			alokasi belanja modal, dan alokasi belanja tak terduga	signifikanatas IPM.
4.	Themby O.M.Palenden, EenN.Wal ewangko, Jacline Sumual (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara.	Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah eviews. Menggunakan data sekunder pada tahun 2008-2017.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan pada sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan untuk sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemsikinan.
5.	Zul Putra S (2017)	Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Luwu	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Luwu, Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM),

			<p>menganalisis atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja dan Analisis Regresi Linear Berganda Untuk mengetahui data yang digunakan dalam menganalisis belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Luwu.</p>	<p>artinya jika belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Luwu. Belanja Ekonomi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Luwu, Karena Adanya belanja pemerintah dengan adanya pembangunan manusia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p>
--	--	--	--	--

D. Kerangka Konsep

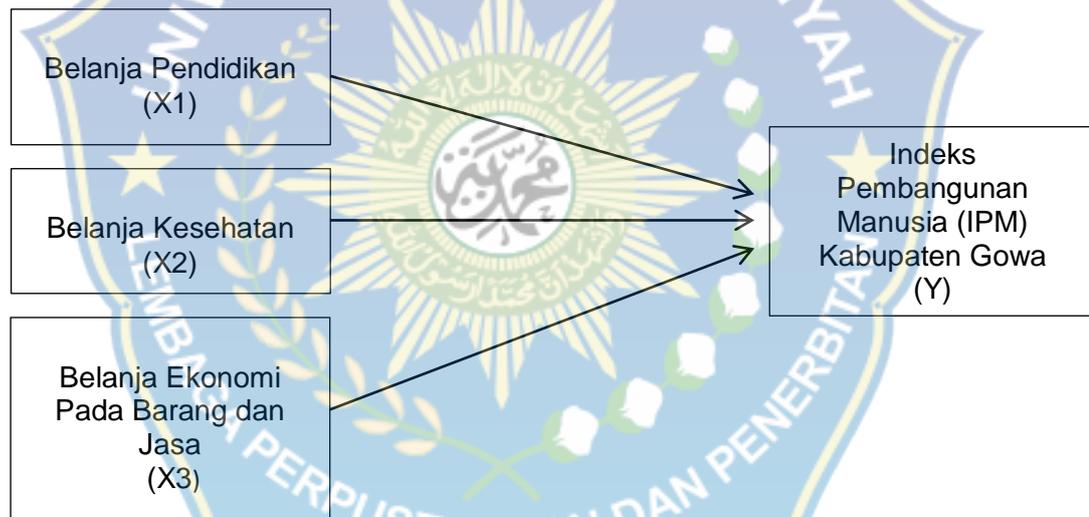
Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan tujuan jangka panjang disuatu masyarakat dan meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya mencapai tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan belanjanya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar belanja dengan tujuan semata-mata untuk

meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan ter-pekerjakan atau meningkat pendapatannya.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi IPM di Kabupaten Gowa adalah besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, serta belanja ekonomi pada barang dan jasa karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 2.1
Skema Penelitian



Gambar 2.2

Kerangka Konsep Penelitian

Dalam kerangka konsep diatas penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X1 (Belanja Pendidikan) dan Variabel X2 (Belanja Kesehatan) dan Variabel X3 (Belanja ekono pada Barang dan Jasa) terhadap variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa).

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pikir terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah Di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gowa.
2. Belanja Daerah Di Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gowa.
3. Belanja Daerah Di Sektor Ekonomi Pada Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gowa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Menurut (Sugiyono 2017) dalam bukunya metode penelitian bahwa kumpulan konsep, proposisi, definisi dan juga variabel yang mana keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya secara sistematis telah berhasil digeneralisasikan, sehingga bisa menjelaskan dan juga memprediksi fenomena dan fakta tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Kabupaten Gowa yaitu kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dan instansi terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup penelitian. Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (*time series*), dimana data dikumpulkan dihitung berdasarkan data sepuluh tahun terakhir. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan, mulai bulan Juli hingga bulan Agustus 2019.

C. Definisi Operasional Dan Pengukuran

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja Pendidikan (X1) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Belanja Kesehatan (X2) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Belanja Ekonomi Pada Barang dan Jasa (X3) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Indeks Pembangunan Manusia (Y) merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga indikator, yaitu Pendidikan (Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah), Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Belanja perkapita riil yang dinyatakan dalam angka indeks (0-100).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data dari realisasi belanja pemerintah dalam jenis Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi pada Belanja Barang Dan Jasa yang diperoleh dari APBD seluruh Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Pengambilan sampel berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dari belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi pada

belanja barang dan jasa yang diperoleh dari APBD seluruh Kabupaten Gowa. selama sepuluh tahun terakhir yaitu periode 2009-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena data dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data dapat ditentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Jadi, pada proposal ini penulis menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

1. Observasi

Observasi yaitu usaha untuk melakukan pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap objek penelitian yang menyangkut beberapa faktor yang mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Dokumentasi

Data dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen-dokumen, neraca atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi pada Belanja Barang Dan Jasa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kurun waktu 2009-2018.

3. Kepustakaan

Data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah yang dikumpulkan langsung dari kantor Badan Pusat Statistik, Instansi terkait, jurnal ekonomi, buku-buku tentang ekonomi dan Otonomi Daerah.

Selain itu, terdapat pula data yang dikumpulkan dari media online (*website*) maupun instansi terkait.

F. Teknik Analisis

Adapun model yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara tiga variabel tersebut, yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka digunakan metode regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi pada Belanja Barang Dan Jasa, sedangkan variabel terikatnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode analisis ini menggunakan program SPSS (*statistic product and service solution*). Adapun bentuk persamaannya yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Belanja Pendidikan

b_2 = Koefisien Belanja Kesehatan

b_3 = Koefisien Belanja Ekonomi pada Belanja Barang dan Jasa

X_1 = Variabel Belanja Pendidikan

X_2 = Variabel Belanja Kesehatan

X_3 = Variabel Belanja Ekonomi pada Belanja Barang dan Jasa

e = Standar Error

1. Uji Asumsi Klasik

Metode *ordinary least square* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi actual. Dibandingkan dengan metode lain, *ordinary least square* merupakan metode sederhana yang digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter penduga yang lebih baik, maka pengujian model terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Uji penyimpangan asumsi klasik tersebut terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas dan menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*) yaitu :

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinierita*. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada

dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2010:234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432).

c) Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi (Singgih Santoso, 2012:241).

d) Uji heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap penggunaan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bisa serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak berguna (*misleading*). Regresi linier klasik mengasumsikan tidak ada heterokedesitas. Heterokedesitas dalam penelitian di deteksi dengan menggunakan uji Glejser dan grafik Plot antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji Koefisien Determinasi (uji R^2). Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (uji F), dan uji Koefisien Regresi Parsial (uji T).

a. Pengujian Koefisien Determinasi (uji R^2)

Koefisien Determinasi (*goodness of fit*) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, 2006).

Menurut Gujarati (2013) nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$)

Keterangan :

- 1) Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas.
- 2) Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen dan model tersebut dapat dikatakan baik.

b. Pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F)

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara :

- 1) Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
- 2) Menentukan *level of significance* (α) tertentu.

- 3) Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
- 4) Menarik kesimpulan.

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F table, dimana nilai F hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 - (k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel penjelas termasuk konstanta.

Pengambilan keputusan:

1. Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara signifikan.
2. Sebaliknya apabila $F \text{ hitung} < F \text{ table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara signifikan.
3. Pengujian koefisien regresi secara individual (uji T)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. (Mudrajad Koncoro, 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Gambaran umum penelitian terdiri dari kondisi geografis daerah penelitian, berbagai perkembangan demografis wilayah dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gowa

1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Sungguminasa. Kabupaten Gowa berada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan.

Luas Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 Km² atau sama dengan 3,01% dari luas Provinsi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa memiliki topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Kabupaten Gowa sebagian besar berada pada wilayah dataran tinggi, yaitu sebesar 72,26%. Terdapat 9 Kecamatan yang berada pada dataran tinggi, diantaranya Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 400, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang tersebar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 Km²

dengan panjang 90 km. Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada tahun 2018 adalah 748.200 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki adalah 347.425 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 386.182 jiwa.

2. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Gowa berada pada $5^{\circ}33'6''$ - $5^{\circ}34'7''$ Lintang Selatan dan $12^{\circ}38'6''$ - $12^{\circ}33'6''$ Bujur Timur. Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 167 Desa/Kelurahan dari 18 Kecamatan. Adapun Kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase %
1.	Bontonompo	30.39	1.61
2.	Bontonompo Selatan	29.24	1.55
3.	Bajeng	60.09	3.19
4.	Bajeng Barat	19.04	1.01
5.	Pallangga	48.24	2.56
6.	Barombong	20.67	1.10
7.	Somba Opu	28.09	1.49
8.	Bontomarannu	52.63	2.79
9.	Pattallassang	84.96	4.51
10.	Parangloe	221.26	11.75
11.	Manuju	91.90	4.88
12.	Tinggimoncong	142.87	7.59
13.	Tombolo Pao	251.82	13.37
14.	Parigi	132.76	7.05
15.	Bungaya	175.53	9.32
16.	Bontolempangan	142.46	7.56
17.	Tompobulu	132.54	7.04
18.	Biringbulu	218.84	11.62
	Jumlah	1883.32	100.00

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Parangloe merupakan Kecamatan yang paling luas dengan luas area 221.26 Km² dengan jumlah persentase sebanyak 11.75% dan Kecamatan Bajeng Barat merupakan Kecamatan paling kecil dengan luas area 19.04 Km².

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan de-

rajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat serta meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan manusia.

Tabel 4.2

Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Gowa tahun 2009-2018

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2009	70,00
2010	70,67
2011	71,29
2012	71,06
2013	72,12
2014	66,12
2015	66,87
2016	67,70
2017	68,33
2018	68,87

Sumber: BPKD Kabupaten Gowa, 2019

Dari tabel di atas, dilihat berdasarkan pencapaian IPM Kabupaten Gowa, selama kurun waktu 2009-2018 ini menggambarkan IPM Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan namun angkanya masih relatif lebih rendah dibandingkan angka IPM Nasional. Menurut BPS (2019) UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: *Low* (IPM kurang dari 50), *Lower-Medium* (IPM antara 50 dan 65,99), *Upper-Medium* (IPM antara 66 dan 79,99) dan *High* (IPM 80 ke atas). Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM Kabupaten Gowa selama periode tahun 2014-2019 masih termasuk kategori menengah-atas/ *Upper-Medium* (IPM antara 66 dan 79,99).

2. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu juga telah dikembangkan berbagai kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Adapun data perkembangan realisasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten
Gowa Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan
2009	284.216,00
2010	276.677,00
2011	334.777,00
2012	394.090,00
2013	467.038,00
2014	477.860,00
2015	490.212,00
2016	505.112,00
2017	550.424,00
2018	568.799,00

Sumber : BPKD Kabupaten Gowa, 2019

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal itu diharapkan dapat di realisasikan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya.

3. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Sektor Kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan hidup secara produktif. Untuk menunjang hal tersebut oleh pemerintah Kabupaten Gowa telah mencanangkan suatu program kesehatan gratis dengan harapan bahwa dengan program tersebut paling tidak telah membawa dampak pada berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan pembayaran kesehatan yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan dari Rp 155.222.00,- menjadi Rp 152.152.00,- Dengan jumlah APBD yang telah disediakan diharapkan pemerintah daerah menggunakannya untuk pembangunan pada sektor pendidikan. Berikut ini tabel yang menggambarkan Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten Gowa.

Tabel 4.4

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Sektor
Kesehatan Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan
2009	61.107,00
2010	70.138,00
2011	84.741,00
2012	96.966,00
2013	107.662,00
2014	125.123,00
2015	130.556,00
2016	125.222,00
2017	152.152,00
2018	155.477,00

Sumber : BPKD Kabupaten Gowa, 2019

4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi Kabupaten Gowa Pada Tahun 2009-2018

Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun pemerintah daerah untuk berbagai belanja daerah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen ini penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut ini menunjukkan tabel belanja daerah kabupaten Gowa pada bidang ekonomi dari tahun 2009 hingga tahun 2018.

Tabel 4.5

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa Sektor
Ekonomi Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi
2009	62.749,00
2010	63.100,00
2011	59.955,00
2012	72.463,00
2013	81.782,00
2014	95.112,00
2015	102.465,00
2016	276.853,00
2017	278.232,00
2018	339.754,00

Sumber : BPKD Kabupaten Gowa, 2019

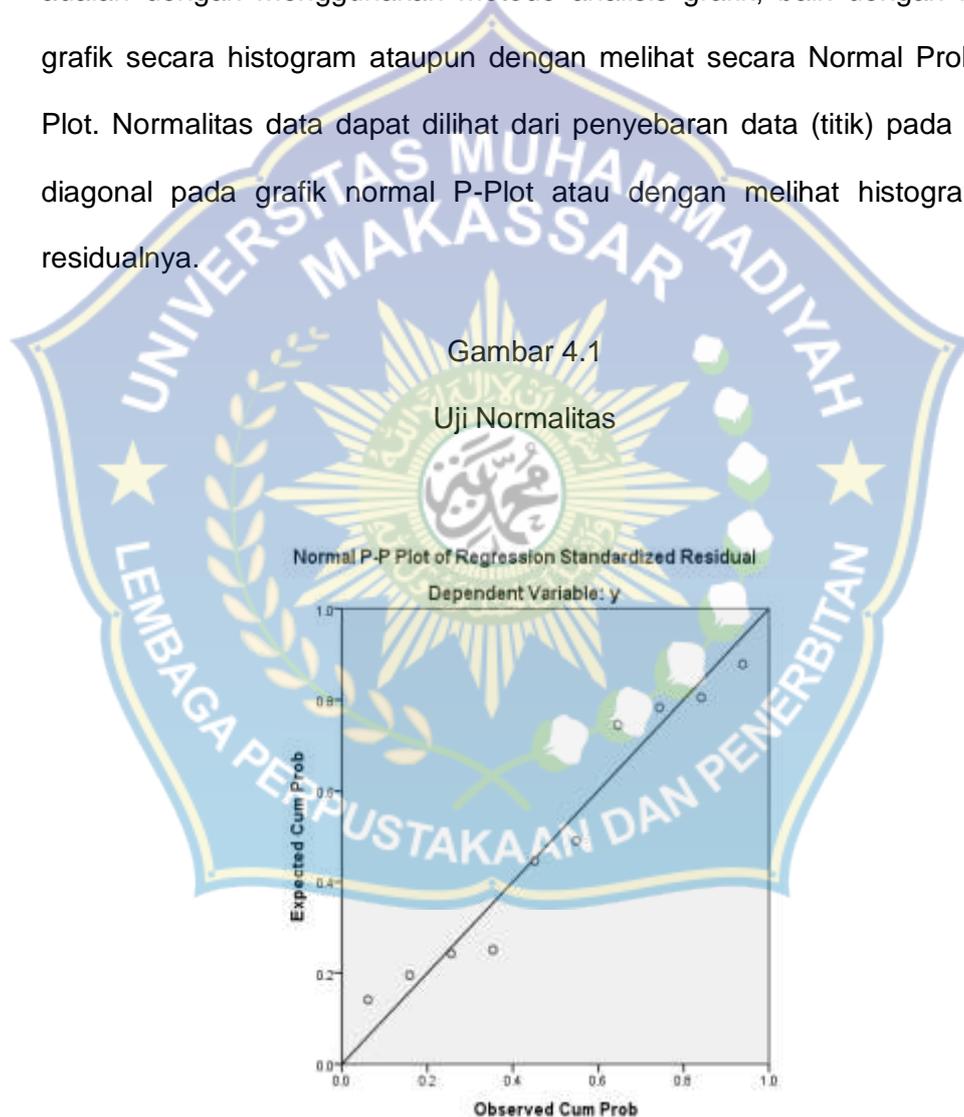
C. Hasil Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika dan menggunakan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2014-2018 .Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 21 yang membantu dalam pengujian pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya.



Sumber: Olah data SPSS 21

Dari gambar 4.1 Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal,

sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas memenuhi dan layak dipakai.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas (*multicollinearity*) adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan linear antar variabel independen. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berikut ini hasil estimasi dari setiap variabel independen untuk menguji multikolinearitas.

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.345	.168			
	B.Pendidikan	-.112	.074	-.541	.169	4.399
	B.Kesehatan	.189	.058	1.192	.166	5.043
	B.Ekonomi	.028	.013	.341	.353	2.831

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Olah data SPSS, 21

Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF lebih kecil dari angka 10,00 atau tolerance lebih besar dari 0,100 maka dinyatakan gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF kurang dari 10,00 atau tolerance lebih dari 0,100 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tidak terjadi gejala Multikolinieritas jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 . Dari olah data pada tabel di atas nilai tolerance pada variabel

Belanja Sektor Pendidikan (X1) adalah $0,169 > 0,100$ dan Belanja Sektor Kesehatan (X2) adalah $0,166 > 0,100$ dan Belanja Sektor Ekonomi (X3) adalah $0,353 > 0,100$. Sementara, nilai VIF untuk variabel Belanja Sektor Pendidikan (X1) adalah $4.399 < 10,00$, pada Belanja Sektor Kesehatan (X2) adalah $5,043 < 10,00$ dan pada Belanja Sektor Ekonomi (X3) ialah $2,831 < 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam model sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan Uji *Runs Test*.

Tabel 4.7

Uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00054
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

Sumber: Olah data SPSS 21

Berdasarkan tabel output "*Runs Test*" diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,737 >$ dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian untuk melihat ada atau tidaknya Heteroskedisitas dapat dilakukan dengan melihat *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik pada *scatter plot* tersebut membentuk pola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah data SPSS 21

Berdasarkan *scatter plot* pada diatas (Uji Heterokedastisitas) terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05.

Tabel 4.8

Uji T

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.345	.168		8.012	.000	
1 B.Pendidikan	-.112	.074	-.541	-1.510	.182	
B.Kesehatan	.189	.058	1.192	3.256	.007	
B.Ekonomi	.028	.013	.341	2.148	.075	

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data olahan SPSS 21,2019

Berdasarkan hasil output SPSS 21 maka dapat dilihat tabel coefficient diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel Belanja Sektor Pendidikan (X1) adalah sebesar 0,182. Karena nilai signifikan (sig) $0,182 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau Belanja Sektor Pendidikan ditolak. Artinya tidak berpengaruh secara signifikan Belanja Sektor Pendidikan (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Sedangkan untuk Belanja Sektor Kesehatan (X2) nilai signifikan (sig) bernilai $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya berpengaruh secara signifikan variabel Belanja Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Adapun dengan variabel

Belanja Sektor Ekonomi (X3) nilai signifikan senilai $0,075 > 0,05$ Artinya tidak berpengaruh secara signifikan variabel Belanja Sektor Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan pengambilan keputusan melalui T tabel senilai 2,447 maka pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Diketahui nilai T hitung variabel Belanja Sektor Kesehatan (X2) adalah sebesar -1,510 dan T Tabel senilai -2,447 . karena nilai T hitung $-1,510 < -2,447$ maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Sektor Pendidikan (X1) tidak berpengaruh secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).
- 2) Variabel Belanja Sektor Kesehatan (X2) T hitung $3,256 > T$ tabel 2,447 maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Sektor Kesehatan (X2) berpengaruh secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).
- 3) Untuk variabel Belanja Sektor Ekonomi (X3) T hitung $2,148 < T$ tabel 2,447 maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Sektor Ekonomi (X3) tidak berpengaruh secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)..

Artinya ada hanya ada satu variabel independen yang berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu variabel Belanja Pendidikan (X2).

b. Uji F

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut.

Tabel 4.9

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.005	3	.002	35.407	.000 ^b
Residual	.000	6	.000		
Total	.005	9			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), B.Ekonomi, B.Pendidikan, B.Kesehatan

Sumber: Olah data SPSS 21

Berdasarkan tabel "Anova" diatas diketahui nilai sig. Adalah sebesar 0,008. Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Belanja Sektor Pendidikan (x1), Belanja Sektor Kesehatan (X2) dan Belanja Sektor Ekonomi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Berdasarkan perbandingan nilai F dengan F tabel, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 35.407 dan F table 8,89. Maka nilai F hitung $35.407 > F$ tabel 8,89 maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Belanja Sektor Pendidikan (X1), Belanja Sektor Kesehatan (X2) dan Belanja Sektor Ekonomi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

c. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang berhubungan dengan variabel dependen.

Tabel 4.10

Uji R^2 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 ^a	.947	.920	.00678

a. Predictors: (Constant), B.Ekonomi, B.Pendidikan, B.Kesehatan

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Olah data SPSS 21,2019

Berdasarkan tabel output spss “model summary” diatas, diketahui nilai koefisien determinasi adaah sebesar 1,000. Besarnya angka koefisien determinasi adalah 0,947 atau sama dengan 94,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Belanja Sektor Pendidikan (x1), Belanja Sektor Kesehatan (X2) dan Belanja Sektor Ekonomi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 94,7%. sedangkan sisanya 5,3% (100% - 94,7%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau yang tidak diteliti.

d. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah sebuah metode pendekatan hubungan antara dua atau beberapa variabel independen dan variabel

dependen. Dengan regresi linear dapat diketahui terdapat atau tidaknya pengaruh antara variabel Belanja Sektor Pendidikan (X1), Belanja Sektor Kesehatan (X2) dan Belanja Sektor Ekonomi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.345	.168		8.012	.000
1 B.Pendidikan	-.112	.074	-.541	-1.510	.182
B.Kesehatan	.189	.058	1.192	3.256	.007
B.Ekonomi	.028	.013	.341	2.148	.075

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Olah data SPSS 21

Menurut Sugiyono (2017) Formulasi persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1(X1) + \beta_2(X2) + \beta_3(X3) + e$$

$$Y = 1,345 + (-0,112)X1 + 0,182X2 + 0,028X3 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Bilangan Konstanta

β_1 β_2 β_3 = Koefisien Regresi

X1 = Belanja Sektor Pendidikan

X2 = Belanja Sektor Kesehatan

X3 = Belanja Sektor Pendidikan

e = Standar error

Hasil dari persamaan regresi pada tabel 4.10 di atas dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Konstanta (β)

Nilai konstanta sebesar 1,345 berarti jika Belanja Sektor Pendidikan (X_1), Belanja Sektor Kesehatan (X_2) dan Belanja Sektor Ekonomi (X_3), nilainya 0 atau konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) nilainya sebesar 1,345.

2) Belanja Sektor Pendidikan (X_1)

Nilai konstanta regresi Belanja Sektor Pendidikan -0,112 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% variabel Belanja Sektor Pendidikan maka akan menyebabkan penurunan IPM di Kabupaten Gowa sebesar -0,112.

3) Belanja Sektor Kesehatan (X_2)

Nilai konstanta regresi Belanja Sektor Pendidikan 0,189 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% variabel Belanja Sektor Kesehatan maka akan menyebabkan peningkatan IPM di Kabupaten Gowa sebesar 0,189%.

4) Belanja Sektor Ekonomi (X_3)

Nilai konstanta regresi Belanja Sektor Ekonomi 0,028 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% variabel Belanja Sektor Ekonomi maka akan menyebabkan peningkatan IPM di Kabupaten Gowa sebesar 0,028%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji statistik variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari nilai signifikan $0.182 > 0.05$, hasil ini berbeda dengan hipotesis dikarenakan jumlah dana dalam belanja pendidikan masih belum cukup untuk memenuhi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih buta huruf dan anak-anak yang tidak bersekolah dan pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan lebih banyak pada belanja pegawai dan belanja tak terduga lainnya.

Hasil uji ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sigit Wibowo bahwa variabel belanja pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan di karenakan efek dari belanja pendidikan tidak bisa di kontrol dikarenakan banyak faktor yang berpengaruh terhadap IPM dan nilai besarnya pengeluaran pendidikan pemerintah masih mengandung biaya tak langsung seperti gaji pegawai, pembangunan prasarana dan sarana yang tidak berkaitan langsung dengan komponen perhitungan nilai IPM.

2. Pengaruh Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji statistik variabel belanja sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikan ($0.007 < 0.05$) dan hipotesis yang mengatakan adanya pengaruh positif dan signifikan yang mengidentifikasi bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan telah menjadi pemicu kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa. Menurut BPS Kabupaten Gowa tahun 2019

sejauh ini 80 persen kelahiran telah ditolong oleh Dokter dan Bidan. Peningkatan belanja setiap tahunnya menjadikan bukti bahwa akses fasilitas kesehatan semakin terjangkau apalagi saat ini banyak masyarakat yang lebih menggunakan kartu BPJS Kesehatan sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses ke Rumah Sakit Daerah maupun yayasan yang melayani kartu BPJS.

Hasil yang sejalan dengan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paddu, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013 ditentukan oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, hal ini dikarenakan setiap kali pemerintah melakukan peningkatan pengeluarannya khususnya pada sektor kesehatan maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur.

Secara teori, hasil ini didukung oleh teori yang terkait dengan pengeluaran Wagner. Teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat yang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik. Beberapa perbaikan telah tercapai dalam beberapa tahun terakhir walaupun kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat.

3. Pengaruh Belanja Sektor Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa belanja ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai signifikan $0,075 > 0,05$. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi meningkat maka akan meningkatkan IPM. Hal ini memperkuat anggapan bahwa belanja ekonomi belum memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pengeluaran atau belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih sulit untuk membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan (IPM) karena hampir seluruh bidang cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi belanja ekonomi lebih banyak diberikan kepada belanja barang dan jasa dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan IPM.

Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel belanja sektor pendidikan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan dilihat dari nilai sig yaitu $0,182 > 0,05$. Hal tersebut di karenakan pengeluaran pemerintah lebih banyak pada belanja tak langsung seperti belanja pegawai dan indicator lainnya yang tidak terhitung pada kenaikan nilai IPM.
2. Variabel belanja kesehatan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y) di Kabupaten Gowa dengan nilai signifikan $0,007 < 0,05$. Dikarenakan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian belanja di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik dan produktivitas penduduk ikut meningkat yang otomatis akan memicu peningkatan IPM di Kabupaten Gowa.
3. Variabel belanja ekonomi (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y) di Kabupaten Gowa dengan nilai signifikan $0,075 > 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan pengalokasian belanja daerah di sektor ekonomi tidak berdampak langsung terhadap peningkatan IPM.

B. Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pengalokasian belanja daerah diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Gowa memberikan alokasi yang lebih besar dibidang pendidikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), menurunkan angka putus sekolah, serta peningkatan sarana belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan IPM. Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dapat memberikan alokasi yang lebih besar dibidang ekonomi untuk kegiatan yang dapat

menurunkan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta peningkatan pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Gowa.

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya



DAFTAR PUSTAKA

Arifin. Mochammad Yull. 2015. Bengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ideks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. Jurnal: *Economia*, Volume 3 , Nomor 1, Edisi April 2015. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2018, Kabupaten Gowa Dalam Angka.

- Bastias Dwi, Desi. 2010. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Skripsi: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Bilal, Wahid A. 2012. Analisa Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2011. Skripsi: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Guritno, Mangkoesoebroto. 2012. Ekonomi Publik. Yogyakarta: PBF.
- Jhingan, ML. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Dana Penerjemahan: D.Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Bambang. 2016 Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulawesi Utara. Jurnal: Berkala Ilmiah Evisiensi Vol. 15 No. 02- Edisi Juli 2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Subandi, MM. 2014. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. Teori Pengantar Makro Ekonomi Edisi Kettiga. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan). Jakarta:Prenada Media Grup.
- Suryani. 2015. Metode Riset Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Ekonomi). Jakarta:Kencana.
- Todaro and Smith, Stephen C. 2014. Economic Development. 11th Edition Ch7.
- Todaro, P Michael. 2011. Pembangunan Ekonomi Jilid 1. Jakarta:Erlangga.
- Wahyudin, Andi. 2015. Pengeluaran Publik dan Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Jurnal:Economia, Volume 2, Nomor 1 Edisi Mei 2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.



L

A

M

P

I

R

A

N

**DATA PENELITIAN:**

Tahun	Belanja pendidikan	Belanja kesehatan	Belanja ekonomi	Indeks pembangunan manusia
2009	284.216,00	61.107,00	62.749,00	70,00
2010	276.677,00	70.138,00	63.100,00	70,67
2011	334.777,00	84.741,00	59.955,00	71,29
2012	394.090,00	96.966,00	72.463,00	71,06

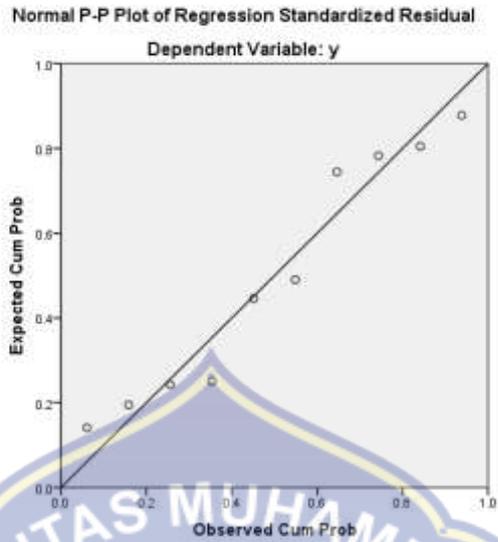
2013	467.038,00	107.662,00	81.782,00	72,12
2014	477.860,00	125.123,00	95.112,00	66,12
2015	490.212,00	130.556,00	102.465,00	66,87
2016	505.112,00	125.222,00	276.853,00	67,70
2017	550.424,00	152.152,00	278.232,00	68,33
2018	568.799,00	155.477,00	339.754,00	68,87

Nilai LN Penelitian

Tahun	Belanja pendidikan	Belanja kesehatan	Belanja ekonomi	Indeks pembangunan manusia
2009	5.45	4.79	4.8	1.78
2010	5.44	4.85	4.8	1.78
2011	5.52	4.93	4.78	1.79
2012	5.6	4.99	4.86	1.79
2013	5.67	5.03	4.91	1.79
2014	5.68	5.13	4.98	1.82
2015	5.69	5.18	5.01	1.83
2016	5.7	5.19	5.44	1.83
2017	5.74	5.18	5.44	1.83
2018	5.75	5.19	5.53	1.84

Lampiran Hasil Uji SPSS 21:

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	1.345	.168			
1 B.Pendidikan	-.112	.074	-.541	.169	4.399
B.Kesehatan	.189	.058	1.192	.166	5.043
B.Ekonomi	.028	.013	.341	.353	2.831

a. Dependent Variable: IPM

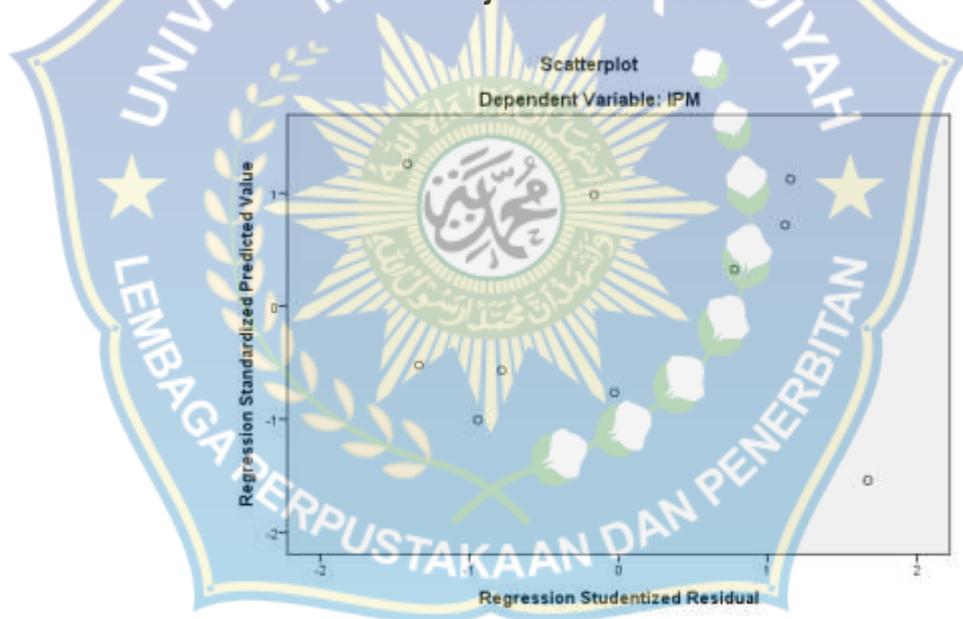
Uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00054
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Uji Heteroskedastis



Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.345	.168		8.012	.000
B.Pendidika	-.112	.074	-.541	-1.510	.182
B.Kesehatan	.189	.058	1.192	3.256	.007
B.Ekonomi	.028	.013	.341	2.148	.075

a. Dependent Variable: IPM

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.005	3	.002	35.407	.000 ^b
Residual	.000	6	.000		
Total	.005	9			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), B.Ekonomi, B.Pendidikan, B.Kesehatan

Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 ^a	.947	.920	.00678

a. Predictors: (Constant), B.Ekonomi, B.Pendidikan, B.Kesehatan

b. Dependent Variable: IPM

Hasil Uji Regresi Linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.345	.168		8.012	.000
1 B.Pendidikan	-.112	.074	-.541	-1.510	.182
B.Kesehatan	.189	.058	1.192	3.256	.007
B.Ekonomi	.028	.013	.341	2.148	.075

a. Dependent Variable: IPM



Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto pengambilan data BPKD Kabupaten Gowa

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 27 April 1997 di Kalase'rena, Kabupaten Bontonompo, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari pasangan Amir Dg Sese dan Hj. Hafsah Dg Ngagi. Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2005 di SDN Kalase'rena, Kabupaten Gowa. Setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Bontonompo, Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2012. Kemudian setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 3 Bontonompo, Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2015.

Setelah tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan.